



JUMAT, 06 JULI 2018

SUMBER BERITA

	RAKYAT BENGKULU		MEDIA INDONESIA
X	BENGKULU EKSPRESS		KOMPAS
	RADAR BENGKULU	

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

Rp 1 Miliar Kelebihan Bayar Kegiatan Bimtek

Sofwin: Temuan Ditindaklanjuti

BENGKULU, BE - Temuan sebesar Rp 1 miliar di Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Provinsi Bengkulu dipastikan akan ditindaklanjuti. Sekwan DPRD Provinsi, H Sofwin Syaiful SH mengatakan, temuan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) itu bukan fiktif, namun ada kelebihan pembayaran kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) anggota dewan dan PNS Sekwan. "Kita tindaklanjuti. Karena itu hanya kelebihan bayar, bukan fiktif," ujar Sofwin kepada BE, kemarin (5/7).

Dipaparkannya, kelebihan pembayaran kegiatan Bimtek itu, pihaknya telah meminta kepada anggota dewan dan PNS untuk mengembalikannya. Sebab temuan BPK itu terjadi, dalam kegiatan Bimtek ada pembatasan yang dibayarkan kepada peserta.

► Baca Rp 1 M ...Hal 15

"Ada batasan dari BPK. Nah kemaren, ternyata bayarnya lewat batas itu. Jadi BPK meminta untuk dikembalikan," tuturnya. Proses pengembalian, menurut Sofwin sudah mulai dilakukan. Bahkan beberapa

anggota dewan dan PNS, ada yang telah selesai mengembalikannya. "Sekarang perkiraan sudah 60 persen selesai dikembalikan. Mudah-mudahan selesai semua," tambah Sofwin.

Ditargetkan, sebelum berakhir 60 hari waktu yang diberikan oleh BPK, temuan kelebihan pembayaran itu sudah diselesaikan. Sebab, yang menerima kelebihan pembayaran sudah komitmen untuk mengembalikannya. "Target kita sebelum 60 hari selesai. Karena tinggal sedikit lagi," tegasnya.

Sementara itu, untuk sisa potensi temuan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi sebesar Rp 800 juta juga sudah diselesaikan. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas PUPR Provinsi Bengkulu, Oktaviano ST MM mengatakan, penyelesaian potensi temuan itu akan dibayarkan ketika

APBD perubahan nanti. "Itu potensi temuan. Karena itu terjadi atas perpanjangan waktu kegiatan pembangunan jalan oleh pihak ketiga pada tahun lalu," ujar Okta.

Menurutnya potensi temuan itu dibayarkan dengan cara pemotongan jumlah anggaran yang akan dibayarkan kepada pihak ketiga. Mengingat tahun ini, pihak ketiga tersebut masih memiliki kegiatan proyek pembangunan jalan.

"Jadi berapa biaya yang akan kita bayarkan itu, nanti kita potong dengan jumlah potensi temuan. Langkah ini sudah disetujui oleh BPK dan masalah ini sudah selesai. Tinggal lagi dibayarkan pada APBD-P nanti," tandasnya. (151)